



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
KATA PENGANTAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-Isu Strategis.....	3
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	16
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 ..	17
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	18
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	32
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	36
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2 Realisasi Anggaran	79
3.3 Inovasi.....	80
3.4 Penghargaan	84

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	85
4.2 Rekomendasi	86

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

RKT / Lain2 yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	5
Tabel 1.2	: Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2025 ..	6
Tabel 1.3	: Tindak Lanjut Atas Laporan SAKIP 2025.....	17
Tabel 1.4	: Tindak Lanjut Rekomendasi LKjIP 2024.....	18
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	22
Tabel 2.2	: Perencanaan Kinerja	25
Tabel 2.3	: Strategi dan Arah Kebijakan	27
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
Tabel 2.5	: Rincian Perjanjian Kinerja Tiap Program Tahun 2025	34
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Predikat Tingkat Ketercapaian Kinerja.....	39
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Tahun 2025.....	40
Tabel 3.3	: Skala Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	42
Tabel 3.4	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tiga Tahun Terakhir.....	44
Tabel 3.5	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	46
Tabel 3.6	: Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi	47
Tabel 3.7	: Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	50

Tabel 3.8 : Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	52
Tabel 3.9 : Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	75
Tabel 3.10 : Realisasi Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025	77
Tabel 3.11 : Pernyataan Risiko dan Upaya Pengendalian Pada Sasaran Strategis Tahun 2025.....	78
Tabel 3.12 : Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Dashboard Aplikasi SSO GRMS Jateng.....	36
Gambar 2.2 : Dashboard Aplikasi SAKTI	37
Gambar 2.3 : Dashboard Aplikasi KINERJAKU KKP.....	37
Gambar 2.4 : Dashboard Aplikasi E-Monev BAPPENAS	37
Gambar 3.1 : Kegiatan Verifikasi Faktual Calon Kelompok Penerima Hibah	59
Gambar 3.2 : Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Rumah Ikan (<i>Fish Apartement</i>)	59
Gambar 3.3 : Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Jaring/ <i>Gillnet</i>	59
Gambar 3.4 : Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Mesin	59
Gambar 3.5 : Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Sarpras Budidaya Bandeng.	60
Gambar 3.6 : Kegiatan Packing Benih Ikan Nila di Loka PBI Janti, Klaten	60
Gambar 3.7 : Kegiatan Panen Ikan Kerapu di Loka PBI Karimunjawa, Jepara....	60
Gambar 3.8 : Kegiatan Panen Udang Vannamei di Loka PBI Tugu, Semarang ...	60
Gambar 3.9 : Kegiatan Pengujian Sampel Parameter Laboratorium Biologi.....	60
Gambar 3.10 : Kegiatan Pengujian Sampel Parameter Laboratorium Biomolekuler	60
Gambar 3.11 : Penyerahan Bantuan Peralatan Kerja Petambak Garam Rakyat (Geoisolator)	63
Gambar 3.12 : Kegiatan Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Rakyat	64
Gambar 3.13 : Kegiatan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir	64

Gambar 3.14 : Kegiatan Kampanye Gemarikan	66
Gambar 3.15 : Kegiatan Bazar Ramadhan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	66
Gambar 3.16 : Kegiatan <i>Cooking Class</i> untuk Taman Kanak-kanak.....	66
Gambar 3.17 : Kegiatan Pengujian Profisiensi.....	66
Gambar 3.18 : Kegiatan Penyadartahuan Nelayan.....	71
Gambar 3.19 : Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha.....	71
Gambar 3.20 : Kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	71
Gambar 3.21 : Kegiatan <i>Coaching Clinic</i> bagi Pengawas Perikanan.....	71
Gambar 3.22 : Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	71
Gambar 3.23 : Kegiatan Pengawasan Budidaya di Perairan Umum Daerah	71
Gambar 3.24 : Tampilan Aplikasi SIANDIN.....	81
Gambar 3.25 : Tampilan Aplikasi SIANDIN-HIDRASI	81
Gambar 3.26 : Penyerahan Kartu Asuransi Nelayan Kepada 24 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	82
Gambar 3.27 : Produksi Garam Menggunakan Geoisolator/ <i>Geomembrane</i>	83
Gambar 3.28 : Program Unggulan Budidaya Nila Salin.....	83
Gambar 3.29 : Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	84

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 : Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tahun 2023-2025	61
Grafik 3.2 : Target dan Realisasi Produksi Garam Tahun 2023-2025	64
Grafik 3.3 : Target dan Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah Tahun 2023-2025	66
Grafik 3.4 : Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	68
Grafik 3.5 : Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025....	70
Grafik 3.6 : Target dan Realisasi Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2023-2025	72

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Semarang, 23 Februari 2026

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Endi Paiz Effendi, S.Pi, MA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197109091996031006

LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada mulanya Dinas Perikanan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Perikanan Darat dan Perikanan Laut. Perikanan Darat pada tahun 1950 disebut juga Banner Is Ray yang berkantor di Jalan Kepodang. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960. Perikanan Darat dipimpin oleh R. Moerdoko pindah kantor di Jalan Empu Tantular No. 2 Semarang. Tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 dipimpin oleh R.M Samiroen.

Jawatan Perikanan Laut pada tahun 1950 bertempat di Jalan Imam Bonjol 134 Semarang. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960 Perikanan Laut dipimpin oleh R.W.M Soebroto. Pada Tahun 1960 samapi tahun 1970 Jawatan Perikanan Laut dipimpin oleh Soekarjo Karto Wirejo. Soekarjo Karto Wirejo digantikan oleh Soeyadi Siswohardjoyo dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1971.

Pada tahun 1972 Perikanan Darat dan Jawatan Perikanan Laut digabung dengan nama Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Soeyadi Siswohardjoyo bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 134 Semarang. Masa kepemimpinan Djoko Setyajit, tepatnya pada tahun 2001 Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama tepatnya pada saat kepemimpinan Ir. Galih Rasiono, M.Pi. Awalnya bernama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 134 Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, telah disusun dokumen perencanaan yang memuat informasi identifikasi masalah, rumusan kegiatan, target indikator kinerja dan kebutuhan anggaran. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka perlu disusun pelaporan kinerja oleh Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dan diukur melalui target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan menjadi salah satu kunci untuk faktor dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir karena kompetensi dan keterampilan rendah/belum memadai, bagi hasil tidak proporsional, praktik ijon, akses permodalan terbatas, jaminan perlindungan nelayan belum optimal, serta dekat dengan kemiskinan;
2. Cenderung menurunnya produksi perikanan tangkap karena *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, unreported hasil tangkapan serta minimnya teknologi penangkapan ikan;
3. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dikarenakan tingginya harga pakan, rendahnya teknologi, wabah penyakit, menurunnya kualitas benih dan induk, serta kurang memadainya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
4. Menurunnya daya dukung pesisir karena abrasi, alih fungsi lahan, perubahan iklim, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan, belum optimalnya pengelolaan ruang laut, serta ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan dengan alokasi ruang laut;
5. Masih rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat dikarenakan rendahnya kompetensi petambak garam dan teknologi produksinya, serta belum adanya perlindungan terhadap komoditas dan harga garam;

6. Rendahnya Angka Konsumsi Ikan dikarenakan rendahnya kompetensi, kurang terkontrolnya jaminan mutu, kurang kesadaran konsumsi ikan masyarakat, serta belum terbentuknya jejaring pemasaran antar pelaku usaha.
7. Belum optimalnya perlindungan usaha sehingga masih rendahnya daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
8. Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dikarenakan minimnya upaya pemberantasan dan penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, fasilitas dan sarpras pendukungnya, dan teknologi pengawasan.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

A. Dukungan SDM

Pada tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 483 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 5 orang, Golongan II sebanyak 19 orang, Golongan III sebanyak 150 orang, Golongan IV sebanyak 29 orang dan PPPK sebanyak 270 orang.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	INSTANSI	JUMLAH	I				II				III				IV				PPPK
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	93					1			5	6	12	4	11	7	5	1		41
2	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI	30				3				1	2	2	1	2	2				17
3	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR	16							1				1	1	1				12
4	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK	11									1			2	1				7
5	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO	15									1	1		2	1				10
6	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG	22									1			4					17
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING	8									1		1	2	1				3
8	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN	15				1				2	2		1	1	1				7
9	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO	11									1				2				8
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG	13									2			3					8
11	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG	11							1		1			1	1				7
12	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA	15				1						4	1	1					8
13	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	23									1	6		5					11
14	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR	20								2	1	3		2	2				10
15	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN	15									1	2	1	2	3				6
16	BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU LAUT	121					1	1	2	1	3	13	5	10					85
17	BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	34							1		5	6	1	7	1				13
JUMLAH		473	0	0	0	5	2	1	5	11	29	49	16	56	23	5	1	0	270

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2026, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 1.2 mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 1.2. Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	14012	1986	Jl. Veteran No. 2 KAB. CILACAP	Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Kebumen	
2	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	564	1980	Ds. Gunung simping , Kec.Cilacap, KAB. CILACAP	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL	
3	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	930	1988	Jl. Ksatrian, Karangkoobar, Sokanegara, KAB. BANJARNEGARA	DINLUTKAN PROV. JATENG	
4	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Singosari Kec. Karangwelas KAB. BANYUMAS	BPBIAT Muntilan	
5	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Tambaksogra Kec. Banyumas KAB. BANYUMAS	BPBIAT Muntilan	
6	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	90939	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	DERMAGA DAN TPI	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
7	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	41742	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	DERMAGA	
8	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	29510	1985	Jl Kerkop No. 1 Ds. Muntilan Kec. Muntilan KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Muntilan MGL	
9	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	10405	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
10	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	11540	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
11	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9720	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
12	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	43990	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
13	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	100	2007	Ds. Parimono, Kec.Mungkid , Kab. Magelang, KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
14	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	28425	1981	Ds. Janti , Kec. Polanharjo , KAB. KLATEN	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Air Tawar Janti di Klaten	
15	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	600	1997	Ds. Ngabean Kec. Kartosuro Kab Sukoharjo,Ngabeyan.Kartasura.KAB. SUKOHARJO	DINLUTKAN PROV. JATENG	
16	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	2207	1958	Jl. Diponegoro No. 90,Tasikagung KAB. REMBANG	Rumah dinas	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
17	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	7405	1996	Ds. Tasikagung , Kec. Rembang, KAB. REMBANG	PPP TASIKAGUNG REMBANG	
18	TANAH.TANAH BANGUNAN POS JAGA/MENARA JAGA	7875	2004	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG	POSKAMLADU	
19	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2009	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG		
20	TANAH.TANAH BANGUNAN PASAR	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG		
21	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG		
22	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	4086	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG	KBT	
23	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14456	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG	PEKARANGAN KBT	
24	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	6359	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG	TPI TASIKAGUNG	
25	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3045	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG	JALAN TPI	
26	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14311	2016	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang, KAB. REMBANG	KAWASAN PPP	
27	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5751	1987	Ds. Jatisari Kec. sluke KAB. REMBANG	PIAP SLUKE REMBANG	
28	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30	2011	DESA SLUKE KEC. SLUKE REMBANG KAB. REMBANG	TANAH UNTUK INSTALASI AIR	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
					BERSIH PIAP SLUKE	
29	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1997	1991	JL. SOEDIRMAN 12A PLANGITAN, KAB. PATI	CABANG DINAS KELAUTAN WIL TIMUR	
30	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	26570	2012	Ds. Pengkolan Kec. Margoyoso KAB. PATI	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
31	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1220	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
32	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	9570	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
33	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1415	2009	Jl. Cik Lanang Jepara, Jobokuto KAB. JEPARA	Ex Kantor Cabang Dinas Jepara	
34	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9296	2013	Karimunjawa KAB. JEPARA	Tanah Untuk Penampungan Air Tawar PPP Karimunjawa	
35	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3000	2014	JL. AE SURYANI,Bulu, KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TPI BULU JEPARA	
36	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1940	1990	Jl. Achmad Dahlan, Kec. Karimunjawa KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
37	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25110	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
38	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25710	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
					Ikan Air Payau Marib	
39	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	22200	2005	Ds. Kauman Kec jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
40	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	20090	2005	Ds. JoboKuto Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
41	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	1500	2012	Ds. Bandengan Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
42	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	19480	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	TANAH TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
43	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	8000	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
44	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	1155	2014	DESA BULU KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TAMBAK BULU JEPARA	
45	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	16160	2014	DESA KAUMAN KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TANAH TAMBAK KAUMAN JEPARA	
46	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	40000	1980	Ds. tambak bulusan kec. karang tengah KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
47	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	13185	2001	Ds. Purworejo Kec. Bonang KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
48	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOL AM IKAN/AKUARIUM	18419	2001	Ds. Morodemak Kec. Bonang KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
49	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	22496	2001	Ds. Berahan Wetan Kec Wedung KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
50	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	39698	2016	PURWOREJO BONANG, Morodemak. KAB. DEMAK	PELABUHAN	
51	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	500	1988	Ds. Nyatnyono , Kec. Ungaran, KAB. SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
52	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9510	1995	Ds. Pojoksari, Kec. Ambarawa, KAB. SEMARANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ambarawa SMG	
53	TANAH.TANAH NON PERSIL LAINNYA	22420	1998	Ds. Turunrejo , Kec. Brangsong, KAB. KENDAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
54	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	7738	2014	DESA GEMPOLSEWU KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL	KANTOR KAWASAN PPP TAWANG KENDAL	
55	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	12360	1988	Ds. Karangasem, Kec. Batang, KAB. BATANG	TPI KLIDANG LOR	
56	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1600	1989	Ds. Karangasem, Kec.Batang, KAB. BATANG	PPP KLIDANG LOR	
57	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	225	1991	Ds.Kedungsegog, Kec. Tulis, KAB. BATANG	TPI ROBAN	
58	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1010	1991	Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, KAB. BATANG	TPI SIKLAYU	
59	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	250	1993	Ds. Kedawung,Kec. Limpung, KAB. BATANG	TPI CELONG	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
60	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	450	2016	KARANGASEM KAB. BATANG	KANTOR	
61	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	10360	2017	WUKIRSARI, KAB. BATANG	TAMBAK	
62	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	11040	1994	Ds. Sejomerto , Kec. Roban, KAB. BATANG	BBI SEJOMERTO	
63	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	725	1988	Ds. Sugih waras, Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) ASEMDOYONG	
64	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	19842	1995	Ds. Lawangrejo Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	BBIAPL TUGU	
65	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	21110	2012	Ds Pesantren Kec. Ulujami KAB. PEMALANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
66	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	20235	2016	DS ASEMDOYONG,Taman , KAB. PEMALANG	PELABUHAN ASEMDOYONG	
67	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	15300	2003	Ds. Banjaranyar , Kec. Randudongkal KAB. PEMALANG	BBI RANDUDONGKAL	
68	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	1600	1993	JL BANDENG MUNJUNGAGUNG, KAB. TEGAL	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	
69	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	190	1993	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
70	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	21400	2016	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB. TEGAL	PPI LARANGAN	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
71	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	91940	1989	Ds. Maribaya Kec. Kramat KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
72	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25000	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
73	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	22250	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
74	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	685	1995	Ds. Brebes , Kec. Brebes, KAB. BREBES	DINLUTKAN PROV. JATENG	
75	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	320	1987	Ds. Wates , Kec. Magelang Utara, KOTA MAGELANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Munt	
76	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1301	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,.Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
77	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1272	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,.Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
78	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	496	2001	Jl. Trunojoyo X/23 A Banyumanik Banyumanik.KOTA SEMARANG	RUMDIN DINLUTKAN PROV. JATENG	
79	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2885	2002	Jl. Imam Bonjol No. 134 Sekayu, Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
80	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	855	2015	Jl. Sisingamangaraja No. 77, Wonotinggal,	RUMDIN	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Candisari, KOTA SEMARANG		
81	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	25180	1990	Ds. Mangunharjo, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
82	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5922	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
83	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	37114	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
84	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	692	1988	Jl. Mpu Tantular No. 2, Bandarharjo, Semarang Utara, KOTA SEMARANG	BALAI KARANTINA DAN KESEHATAN IKAN	
85	TANAH.TANAH BANGUNAN LABORATORIUM	2320	1978	Jl. Siliwangi No. 636, Krapyak, Semarang Barat, KOTA SEMARANG	LPPMHP SEMARANG	
86	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	13485	1993	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	BPPI WONOKERTO	
87	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2000	1977	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL P	
88	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG. TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	5480	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PERUM KOMPLEK JONGOR	
89	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	7720	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
90	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	43160	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
91	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	36688	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PELELANGAN IKAN	
92	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	11520	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
93	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	50406	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	DERMAGA	

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id>, Email: dkp@jatengprov.go.id, facebook: dkpjateng; Twitter @dkpjateng; Instagram @dkpjateng; Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

C. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025, didukung dengan Anggaran sebesar Rp112.755.757.000,00 dengan realisasi keuangan Rp109.248.072.217,00 (96,89%).

1.4 Sistematika

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sering dihadapi organisasi. Di dalam bab I terdapat pula tindak lanjut LHE SAKIP 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

RKT / Lain2 yang dianggap perlu

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

Berdasarkan surat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/778/PPD/2025 tanggal 10 Juli 2025 disampaikan bahwa nilai hasil evaluasi SAKIP DKP adalah 85,85 dan termasuk kategori “A” (Memuaskan) yaitu dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Nilai ini mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yakni 85,20 dan termasuk kategori “A” (Memuaskan). Adapun saran dan rekomendasi yang diberikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya yakni sesuai Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tindak Lanjut Atas Laporan SAKIP 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menyelaraskan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), RKT, Renja, Renja, dan Renstra yang menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai.	Menyesuaikan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), RKT, Renja, Renja, dan Renstra yang menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai.

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Tabel 1.4.
Tindak Lanjut Rekomendasi LKjIP 2024

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1	Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan dengan memberikan bantuan stimulan, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pembinaan/penyadartahuan sebagai upaya meningkatkan produktivitas pelaku usaha serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sudah selesai ditindaklanjuti	https://bit.ly/dkp-tahunan-2025
2	Mempromosikan produk-produk hasil kelautan dan perikanan serta membangun jaringan pemasaran sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan di Jawa Tengah.	Sudah selesai ditindaklanjuti	https://bit.ly/dkp-tahunan-2025
3	Meningkatkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada perairan umum daratan dan perairan laut sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus.	Sudah selesai ditindaklanjuti	https://bit.ly/dkp-tahunan-2025
4	Peningkatan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah menuju pelayanan prima	Telah dilaksanakan pelatihan untuk jabatan fungsional SDM	https://bit.ly/dkp-tahunan-2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi antara RPJMD tahun 2018-2023 yang berakhir di tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kekosongan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sehingga dampaknya dari sisi perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.

Pada dokumen RPD Tahun 2024-2026 telah dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah: 1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2. Kualitas sumber daya manusia yang

berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya sampai dengan tahun 2026, tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah diarahkan pada "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu: 1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mendukung sasaran pembangunan daerah **"meningkatnya perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis."**

A. Tujuan

Berdasarkan rumusan dan identifikasi terhadap rencana dan tujuan pembangunan daerah serta permasalahan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah, telah disusun tujuan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
3. Meningkatkan Kualitas ekosistem kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi perikanan indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun).
2. Meningkatnya produksi garam indikator sasaran: produksi garam (ton/tahun).
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan indikator sasaran: angka konsumsi ikan (angka).
4. Meningkatnya nilai tukar nelayan indikator sasaran: nilai tukar nelayan (angka).
5. Meningkatnya nilai tukar pembudidaya ikan indikator sasaran: nilai tukar pembudidaya ikan (angka).
6. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif indikator sasaran: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%).
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran: Indeks kepuasan Masyarakat
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Risiko Perangkat Daerah indikator sasaran: Indeks manajemen risiko.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2022/2023)		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	1,40	1,50	1	1,1	1,2	1,2
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	(Ton/ Tahun)	992.962,58	1.042.610,71	927.350	952.718	979,038	2.859.106
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	(Ton/ Tahun)	373.463,29	392.136,46	133.320	134.640	135.960	403.920
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)				107,78	108,05	108,32	108,32
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah (Kg/Kap/Thn)	kg/kapita/ tahun	32,85	33,67	40,12	40,92	41,74	41,74

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2022/2023)		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	108	109	105	105,50	106	106
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	101	101	110	110,50	112	112
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan		Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	-	-	0,75	0,79	0,84	0,84
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	80	85	62	63	64	64

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2022/2023)		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	82	83	84	84
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	82	83	84	84
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	82	83	84	84

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan target kinerja melalui rencana kinerja pada tahun 2025 serta didukung dengan penetapan strategi dan arah kebijakan. Rencana Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Table 2.2.
Perencanaan Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	Persen (%)	1,1
1.1		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	952.7178
1.2		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam (ton/tahun)	Kg/Kap/Tahun	134.640
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	110,5
2.1		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah (Kg/Kap/Thn)	kg/kapita/tahun	17,3
2.2		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,5
2.3		Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	108,05
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan		Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0,79
3.1		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) yang	%	63

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan		
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83
4.1		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84
4.2		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,6

Berdasarkan tabel 2.2 rencana kinerja yang telah disusun dapat dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan yang sesuai. Strategi disusun dengan mengacu terhadap sasaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Dengan disusunnya strategi tersebut, dapat ditentukan arah kebijakan yang menjadi pedoman penyusunan kebijakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun strategi dan arah kebijakan yang disusun tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi produksi perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1. Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui: a. Pengembangan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan b. Replacement alat tangkap yang ramah lingkungan c. Sosialisasi dan gerai perizinan perikanan tangkap d. Peneggelaman fish apartment e. Penyediaan data dan sumber informasi SDI f. Penggunaan teknologi penangkapan ikan g. Penerapan cold chain system pada kapal perikanan h. Penyediaan dokumen pengembangan Kawasan pelabuhan perikanan i. Penyelenggaraan operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran j. Penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan usaha k. Pengembangan SPBN
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui: a. Intensifikasi dan penerapan teknologi produksi perikanan budidaya yang adaptif b. pengembangan pakan ikan mandiri c. peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya d. Pengembangan sentra/Kawasan/kampung perikanan budidaya e. Peningkatan sarana dan prasarana produksi benih dan calon induk unggul
				3. Pengendalian sebaran hama penyakit ikan melalui a. Fasilitasi monitoring kualitas lingkungan budidaya b. Penyebarluasan informasi terkait dengan perubahan iklim c. Fasilitasi pengujian kesehatan dan hama penyakit ikan d. Fasilitasi penyebarluasan informasi terkait dengan hama dan penyakit ikan e. Fasilitasi pendataan dan pembinaan peredaran Obat Ikan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatnya Produksi Garam	Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi	4. Pengembangan usaha garam rakyat melalui: - Pembangunan dan revitalisasi prasarana antara lain saluran tambak garam dan jalan produksi - Pemberian bantuan sarana produksi - Peningkatan kompetensi SDM petambak garam - Peningkatan luasan tambak garam yang menerapkan teknologi - Penyusunan data potensi garam rakyat Jawa Tengah 5. Pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir melalui: - Sosialisasi dan pelatihan teknologi tepat guna serta pelatihan manajemen usaha mulai dari pra produksi hingga paska produksi dan pemasaran - Pemberian bantuan sarana prasarana usaha
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	1. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui: - Pemenuhan kebutuhan bahan baku; - Peningkatan konsumsi ikan - Peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, sanitasi dan higien - Peningkatan kompetensi pengolah hasil perikanan - Peningkatan sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan - Promosi dan pemasaran
		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	2. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui: - Pembiayaan premi asuransi nelayan - Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil - Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu - Fasilitasi kurikulum kelautan dan perikanan di Institusi Pendidikan - Fasilitasi regenerasi nelayan berupa rekomendasi untuk masuk sekolah dan perguruan tinggi perikanan - Sosialisasi dan fasilitasi perjanjian kerja laut (PKL) - Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha melalui kelembagaan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	h. Pelatihan ketrampilan dan peningkatan kompetensi awak kapal perikanan 3. Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan melalui: a. Peningkatan ketrampilan pembudidaya ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB) b. Fasilitasi terkait dengan ijin usaha perikanan budidaya c. Fasilitasi terkait dengan informasi perubahan iklim ekstrim d. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan usaha perikanan budidaya
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	1. Pengelolaan dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui a. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi b. Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi c. Pemutakhiran data potensi kelautan, pesisir dan pulau” kecil Jawa Tengah d. Rehabilitasi ekosistem mangrove dan penenggelaman terumbu karang buatan e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah terintegrasi dengan RTRW f. Sosialisasi pengelolaan Kawasan konservasi kepada stake holder terkait g. Monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang laut h. Verifikasi teknis terkait rencana pengajuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut i. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil dari alat tangkap aktif bermesin dan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon. j. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir k. Pemanfaatan teknologi digital dengan pengembangan sistem aplikasi yang mencakup update informasi terkait sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah
				2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan, melalui: a. Meningkatkan angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan. c. Meningkatkan sinergitas stakeholder kelautan dan perikanan dalam antisipasi konflik antar nelayan. d. Meningkatkan cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.

Program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan). Program dimaksud adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Adapun kegiatan pendukung pelaksanaan masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Program pengelolaan perikanan tangkap:
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.
 - c. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.
2. Kegiatan pada program pengelolaan perikanan budidaya:
 - a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat.
3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.

- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4. Kegiatan pada program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.
 - b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 5. Kegiatan pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah dilakukan pembahasan dan penajaman dengan pihak terkait, maka telah dilakukan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TUJUAN			
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	1,1 (%)

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN			
1.1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	952.718 (Ton)
1.2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Garam	134.640 (Ton)
TUJUAN			
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	108,05 (Angka)
SASARAN			
2.1	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah (Kg/Kap/Thn)	17,3(Angka)
2.2	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105,5 (Angka)
2.3	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	110,5 (Angka)
TUJUAN			
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	0,79 (%)
SASARAN			
3.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	63 (%)
TUJUAN			
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82
SASARAN			
4.1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
4.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,6

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada Tabel 2.4 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 (Empat) tujuan dan 8 (Delapan) Sasaran. Perjanjian kinerja tersebut selanjutnya dapat menjadi acuan program dan kegiatan yang disusun dengan mengacu kepada Kepmendagri 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Rincian Perjanjian Kinerja Tiap Program Tahun 2025

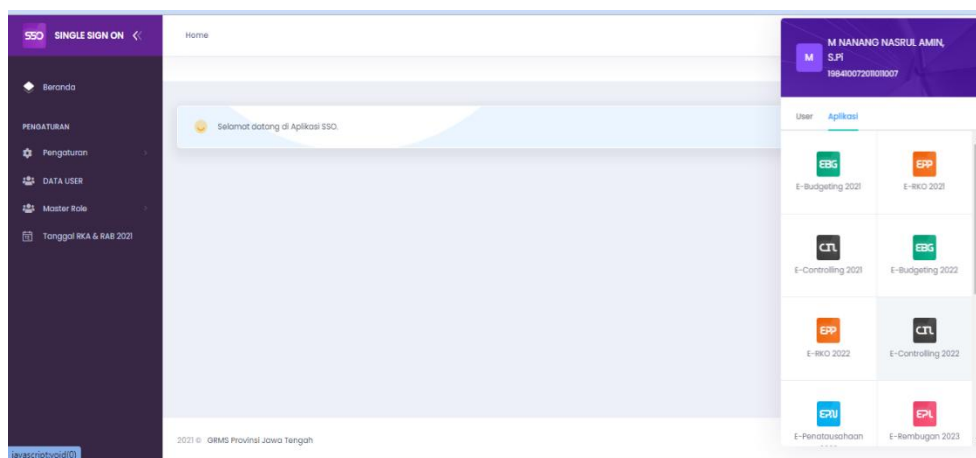
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	5	33.062.373.000
		Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,54	1.626.900.000
		Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	50	204.250.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	72	1.223.079.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemboyong	72,72	521.729.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	687.968.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	100	660.411.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	71,72	452.860.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81	949.417.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	808.052.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	1.167.056.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	72,27	578.056.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63	471.721.000
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72	469.688.000
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	825.007.000
		Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5	10.653.158.000
		Produksi perikanan budidaya	609.000	1.611.173.000
		Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,55	246.105.000
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan	160.800	720.510.000
		Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	876.623.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
4.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase produksi garam	2	397.970.000
		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5	268.692.000
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	4	324.560.000
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2,93	259.599.000
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	7,8	412.471.000
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70	419.272.000
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2	252.695.000
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	61	89.807.000
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2	132.461.000
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61	135.782.000
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	2	205.289.000
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	61	124.920.000
6.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	441.519.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	51.582.171.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

A. Aplikasi GRMS/SSO

Untuk mendukung tercapainya Kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan good governance, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menggunakan instrument pendukung dari Sistem GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, serta e-controlling yang berfungsi untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD Aplikasi GRMS/SSO.



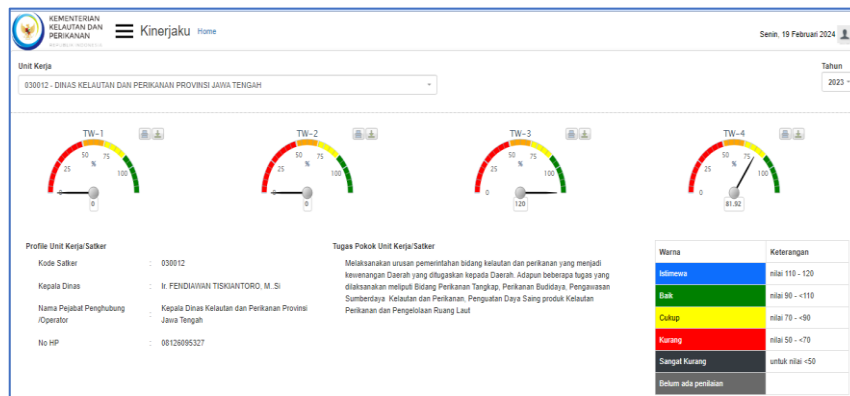
Gambar 2.1. Dashboard Aplikasi SSO GRMS Jateng

B. Aplikasi Penunjang Pelaksanaan Dekonsentrasi

Untuk mendukung tercapainya Kinerja yang optimal Dana Dekonsentrasi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menggunakan Instrumen Pendukung mulai dari Aplikasi SAKTI dan Monsakti, Aplikasi E-Monev Bappenas, Aplikasi Kinerjaku Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berfungsi untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja Dana Dekonsentrasi.



Gambar 2.2. Dashboard Aplikasi SAKTI



Gambar 2.3. Dashboard Aplikasi KINERJAKU KKP



Gambar 2.4. Dashboard Aplikasi E-Monev BAPPENAS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis 2024 – 2026. Laporan kinerja instansi pemerintah dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2025. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator

masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Predikat Tingkat Ketercapaian Kinerja

NO	SKALA	KATEGORI
1	> 91%	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%	Tinggi
3	66 – 75,99%	Sedang
4	51 – 65,99%	Rendah
5	≤ 50,99%	Sangat Rendah

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator tujuan dan sasaran yang diampu. Sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 4 (empat) tujuan serta 8 (delapan) sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025, yaitu:

A. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
3. Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan; dan
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

B. Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya Produksi Garam;
3. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI);
4. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan;
5. Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan;
6. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif;
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
8. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	1,1	1,1	100	1,20
A	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Ton	952.718	974.612,08	102,30	2.859.106
B	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Ton	134.640	177.299,34	131,68	403.920
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	108,05	108,05	100	108,32
A	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	17,3	17,3	100	41,74
B	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Angka	105,5	99,93	94,72	106
C	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110,5	107,19	97,00	112

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian %	
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0,79	5,39	682,28	0,84
A	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	63	63	100	64
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83	74,46	89,71	84
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	89,25	106,25	85
B	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,6	2,93	112,69	84

Sumber Data: Aplikasi Econtrolling GRMS, 2025

Tabel 3.3.
Skala Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	1,1	1,1	100	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
A	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	952.718	974.612,08	102,30	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
B	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	134.640	177.299,34	131,68	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	108,05	108,05	100	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
A	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	17,3	17,3	100	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
B	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	105,5	99,93	94,72	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
C	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	110,5	107,19	97,00	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	0,79	5,39	682,28	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
A	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	63	63	100	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	83	74,46	89,71	Tinggi	Econtrolling (GRMS)
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	89,25	106,25	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)
B	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,6	2,93	112,69	Sangat Tinggi	Econtrolling (GRMS)

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tiga Tahun Terakhir

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	1,50	1,50	100	1	1	100	1,1	1,1	100
A	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan (Ton)	1.023.928, 09	855.734,92	83,57	927.350	968.353,80	104,42	952.718	974.612,08	102,30
B	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam (Ton)	207.505,12	595.984,41	287,21	133.320	629.952,95	472,51	134.640	177.299,34	131,68
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) (Angka)	-	-	-	107,78	104,83	97,26	108,05	108,05	100
A	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	37,07	38,83	104,75	40,12	40,12	100	17,3	17,3	100
B	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	108	104,22	96,50	105	101,41	96,58	105,5	99,93	94,72
C	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Angka)	101	110,53	109,44	110	107,34	97,58	110,5	107,19	97,00
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi (%)	25	36,02	144,07	0,75	0,75	100	0,79	5,39	682,28
A	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	61	61	100	62	62	100	63	63	100
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) (Angka)	-	-	-	82	82	100	83	74,46	89,71

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian %
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	81	89	109,88	83	90,75	109,34	84	89,25	106,25
B	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko (Angka)	-	-	-	3	2,69	89,67	2,6	2,93	112,69

Sumber Data: Aplikasi Econtrolling GRMS

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	1,1	1,20	91,67%
A	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan (Ton)	974.612,08	2.859.106	34,09%
B	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam (Ton)	177.299,34	403.920	43,89%
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) (Angka)	108,05	108,32	99,75%
A	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	17,3	41,74	41,45%
B	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	99,93	106	94,27%
C	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Angka)	107,19	112	95,71%
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi (%)	5,39	0,84	641,67%
A	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	63	64	98,44%
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) (Angka)	74,46	84	88,64%
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	89,25	85	105,00%
B	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko (Angka)	2,93	84	3,49%

Tabel 3.6.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	1,1	1,1	100		
A	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	952.718	974.612,08	102,30	1. Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) ditunda sampai 31 Desember 2025 sehingga nelayan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal. 2. Adanya petugas enumerator dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas mendata jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. 3. Cuaca atau iklim pada tahun 2025 relatif aman terkendali sehingga nelayan (kapal besar) dapat melaut untuk menangkap ikan.	
B	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	134.640	177.299,34	131,68	Petambak garam tetap memproduksi garam saat musim kemarau basah dengan bantuan teknologi informasi berupa prakiraan cuaca sehingga meminimalisir gagal panen.	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	108,05	108,05	100		
A	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	17,3	17,3	100		
B	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	105,5	99,93	94,72		
C	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	110,5	107,19	97,00		
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	0,79	5,39	682,27	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi mencapai 5,39% terdiri dari mangrove dan cemara laut. Realisasi berasal dari CDK Wilayah Barat sebesar 4,00%, CDK Wilayah Timur sebesar 7,81% dan CDK Selatan sebesar 4,38%. Capaian melampaui target karena adanya tambahan penanaman mangrove dari anggaran perubahan, bantuan CSR dari BUMN/swasta, Program Prioritas Gubernur Mageri Segara, dan melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	
A	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I	63	63	100		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan					
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	83	74,46	89,71		
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	89,25	106,25	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 (tiga) unsur terendah hasil SKM periode sebelumnya. Pelayanan yang termasuk 3 (tiga) unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu kelengkapan sarana dan prasarana, biaya dan produk spesifikasi jenis pelayanan.	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
B	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,6	2,93	112,69	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 800/1484/I/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tim pengelola risiko berperan aktif dalam memastikan kegiatan perangkat daerah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melindungi aset negara, meningkatkan keandalan pelaporan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	

Tabel 3.7.
Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	1,1	1,1	100	54.436.101.000	54.089.062.084	99,36	0,64
A	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	952.718	974.612,08	102,30	54.038.161.000	53.693.383.560	99,36	0,64
B	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	134.640	177.299,34	131,68	397.970.000	395.678.524	99,42	0,58

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	108,05	108,05	100	3.466.138.000	3.331.933.526	96,13	3,87
A	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	17,3	17,3	100	1.593.133.000	1.490.899.706	93,58	6,42
B	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	105,5	99,93	94,72	1.626.900.000	1.594.950.000	98,04	1,96
C	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	110,5	107,19	97,00	246.105.000	246.083.820	99,99	0,01
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	0,79	5,39	682,28	2.829.798.000	2.821.898.745	99,72	0,28
A	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	63	63	100	2.829.798.000	2.821.898.745	99,72	0,28
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	83	74,46	89,71	52.023.690.000	49.005.177.862	94,20	5,80

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	89,25	106,25	51.582.171.000	48.566.256.584	94,15	5,85
B	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,6	2,93	112,69	441.519.000	438.921.278	99,41	0,59
TOTAL (1+2+3+4)						112.755.757.000	109.248.072.217	96,89	3,11

Tabel 3.8.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Produksi Perikanan	102,30	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	53,2	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	111,11	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemtoyong	100	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	122,22	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	142,86	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	99,99	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	100	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	113,2	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	100	Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	Menunjang
					Persentase produksi ikan konsumsi air laut	104,8	Menunjang
					Produksi perikanan budidaya	59,81	Menunjang
		Produksi garam	131,68	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase produksi garam	1.716	Menunjang
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Angka Konsumsi Ikan	100	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan	122,38	Menunjang
					Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	102	Menunjang
		Nilai Tukar Nelayan	94,72	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	114,19	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	97,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	121,82	Menunjang
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	100	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	102,86	Menunjang
					Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	100	Menunjang
					Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	100	Menunjang
					Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	100	Menunjang
					Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	103,28	Menunjang
					Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	100	Menunjang
					Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur		
					Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	100	Menunjang
					Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	88,89	Menunjang
					Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	95,01	Menunjang
					Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	63,41	Menunjang
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	90,01	Menunjang
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	106,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Sekretariat	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Karimun Jawa Kelas B		
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah – Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	100	Menunjang
		Indeks Manajemen Risiko	112,69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	Menunjang

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki 8 (delapan) sasaran strategis. Masing-masing sasaran didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator kinerja produksi perikanan didukung oleh 2 (dua) program, yaitu: Program pengelolaan perikanan tangkap dan Program pengelolaan perikanan budidaya. Program pengelolaan perikanan tangkap meliputi Bidang Perikanan Tangkap serta 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan. Sedangkan program perikanan budidaya meliputi Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut.



Gambar 3.1. Kegiatan Verifikasi Faktual Calon Kelompok Penerima Hibah



Gambar 3.2. Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Rumah Ikan (*Fish Apartement*)



Gambar 3.3. Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Jaring/*Gillnet*



Gambar 3.4. Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Mesin



Gambar 3.5. Kegiatan Penyerahan Bantuan Hibah Sarpras Budidaya Bandeng



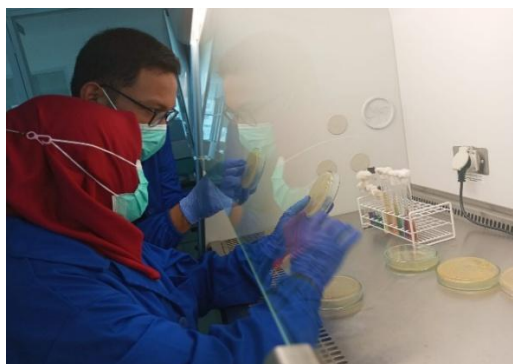
Gambar 3.6. Kegiatan Packing Benih Ikan Nila di Loka PBI Janti, Klaten



Gambar 3.7. Kegiatan Panen Ikan Kerapu di Loka PBI Karimunjawa, Jepara



Gambar 3.8. Kegiatan Panen Udang Vannamei di Loka PBI Tugu, Semarang

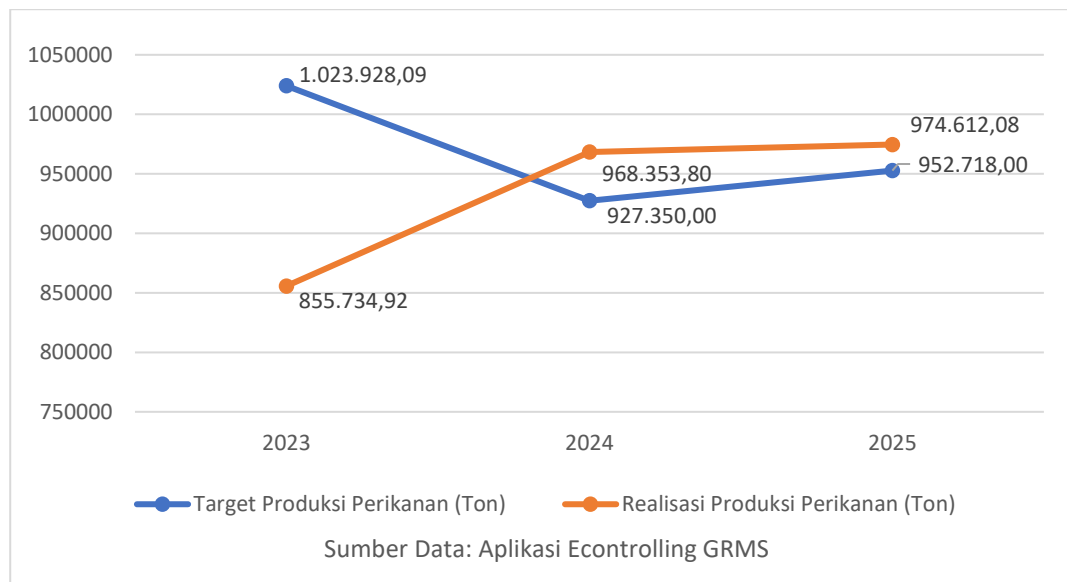


Gambar 3.9. Kegiatan Pengujian Sampel Parameter Laboratorium Biologi



Gambar 3.10. Kegiatan Pengujian Sampel Parameter Laboratorium Biomolekuler

Indikator kinerja produksi perikanan merupakan akumulasi realisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya. Realisasi produksi perikanan tersaji pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3.1. Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tahun 2023-2025

Produksi perikanan tahun 2025 terealisasi 974.612,08 ton dari target 952.718 ton sehingga persentase realisasi sebesar 102,30%. Komponen penyusun produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap tahun 2025 terealisasi 436.592,13 ton dari target 343.717,5 ton sehingga persentase realisasi sebesar 127,02%. Realisasi produksi perikanan tangkap melebihi target disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) ditunda sampai 31 Desember 2025 sehingga nelayan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal.
2. Adanya petugas enumerator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas mendata jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan,

Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

3. Cuaca atau iklim pada tahun 2025 relatif aman terkendali sehingga nelayan (kapal besar) dapat melaut untuk menangkap ikan.

Namun terkait belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan tangkap terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/kelompok nelayan.
2. Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin perikanan tangkap.
3. Kondisi *overfishing* di WPP 712 dan 573 yang menjadi kewenangan provinsi.
4. Relatif tingginya *unreported* produksi hasil tangkapan/hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat.
5. Masih belum optimalnya pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil) dari alat tangkap aktif bermesin.

Produksi perikanan budidaya tahun 2025 terealisasi 538.019,95 ton dari target 609.000 ton sehingga persentase realisasi sebesar 88,34%. Realisasi produksi perikanan budidaya tidak tercapai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Musim yang tidak menentu pada Triwulan III dan IV di beberapa Kabupaten/Kota yang menyebabkan pembudidaya mengurangi tebar benihnya supaya tidak terjadi kematian.
2. Penurunan permintaan pasar yang mengakibatkan pembudidaya membatasi jumlah tebar ikan.
3. Harga ikan yang cenderung stagnan, sehingga banyak pembudidaya ikan beralih ke usaha yang lain.

4. Berkurangnya luasan tambak di kecamatan Kaliwungu sebanyak kurang lebih 800 Ha, karena adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) dan sebagian besar lagi terkena abrasi akibat dampak pembangunan Pelabuhan Kaliwungu, selain itu disebabkan tanggul tambak banyak yang rusak dan tenggelam akibat rob / pasang sehingga tidak efektif untuk usaha budidaya ikan.
5. Adanya pengurangan jumlah petakan Karamba Jaring Apung (KJA) yang aktif pada Waduk Kedung Ombo karena adanya proyek pembangunan PLTS oleh PT. Indonesia Power serta penurunan daya dukung perairan (berdasarkan kajian BBWS Pemali Juana) yang semula petakan KJA aktif 7.872 petak menjadi 4.482 petak (masih berpotensi penurunan jumlah petakan lagi menjadi 3.175 petak sesuai dengan yang dianjurkan oleh BBWS Pemali Juana)

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Garam

Indikator kinerja produksi garam didukung oleh 1 (satu) program, yaitu: Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengampu sasaran strategis meningkatnya produksi garam pada bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.



Gambar 3.11. Penyerahan Bantuan Peralatan Kerja Petambak Garam Rakyat (Geoisolator)

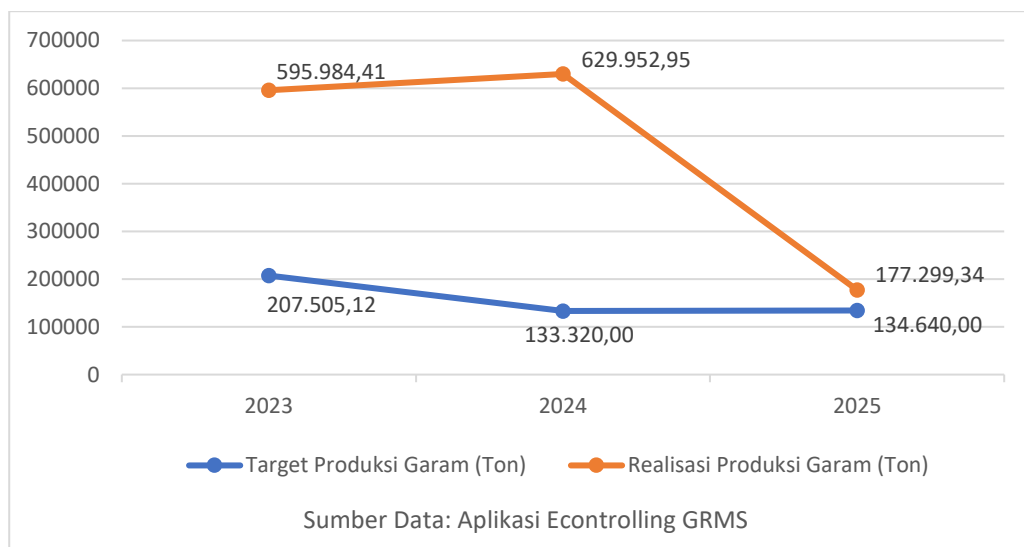


Gambar 3.12. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Rakyat



Gambar 3.13. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir

Produksi garam Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2025 tersaji pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3.2. Target dan Realisasi Produksi Garam Tahun 2023-2025

Tingkat produksi garam tahun 2025 terealisasi 177.299,34 ton dari target 134.640 ton sehingga persentase realisasi sebesar 131,68%. Salah satu keberhasilan capaian produksi garam yaitu petambak garam tetap memproduksi garam saat musim kemarau basah dengan bantuan teknologi informasi berupa prakiraan cuaca sehingga meminimalisir gagal panen. Meskipun realisasi produksi garam melebihi target namun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi produksi garam di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan peningkatan produksi garam terkait dengan perbaikan atau pembangunan infrastruktur berupa sungai dan irigasi tambak garam serta jalan produksi.
2. Petambak garam belum dapat memproduksi secara optimal disebabkan musim kemarau basah.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi infrastruktur, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana serta dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di provinsi maupun kabupaten.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah didukung oleh 1 (satu) program, yaitu: Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pengampu program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas serta Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan.



Gambar 3.14. Kegiatan Kampanye Gemarikan



Gambar 3.15. Kegiatan Bazar Ramadhan Dinas Kelautan dan Perikanan

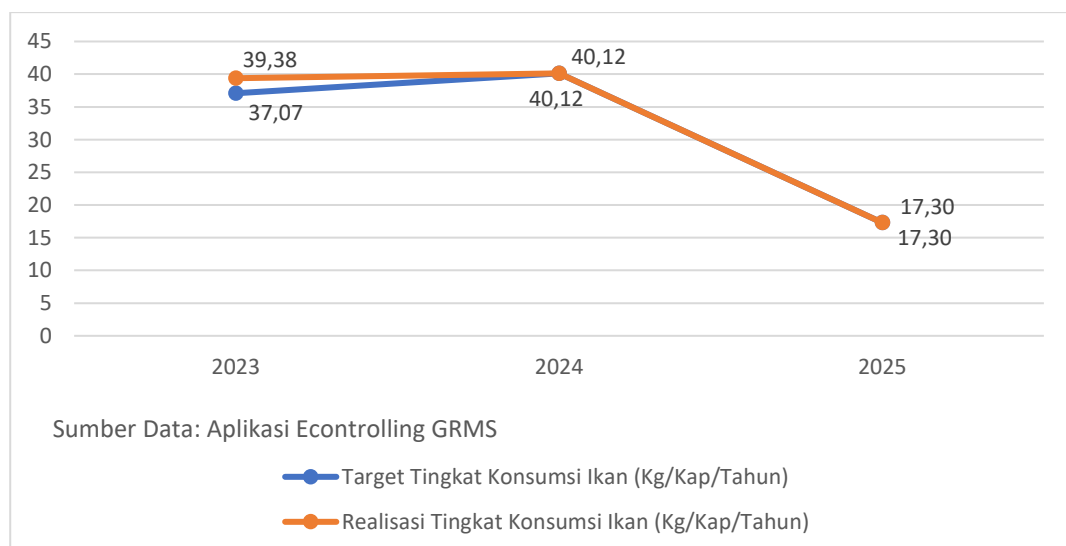


Gambar 3.16. Kegiatan *Cooking Class* untuk Taman Kanak-kanak



Gambar 3.17. Kegiatan Pengujian Profisiensi

Realisasi tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah tahun 2023-2025 tersaji pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3.3. Target dan Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah Tahun 2023-2025

Target Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Jawa Tengah tahun 2025 mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan reformulasi perhitungan AKI menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) berdasarkan surat dari Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor B.4783/DJPDSPKP.5/TU.210/X/2024. Realisasi angka Konsumsi Ikan Masyarakat Jawa Tengah tahun 2025 terealisasi 17,3 kg/kapita/tahun dari target 17,3 kg/kapita/tahun sehingga persentase realisasi sebesar 100%. Realisasi angka konsumsi ikan masyarakat masih bersifat sementara karena belum melalui tahap validasi tingkat nasional. Angka konsumsi ikan masyarakat di Jawa Tengah tahun 2025 masih berada di bawah realisasi angka konsumsi ikan masyarakat secara nasional tahun 2025 yaitu sebesar 26,08 kg/kapita/tahun.

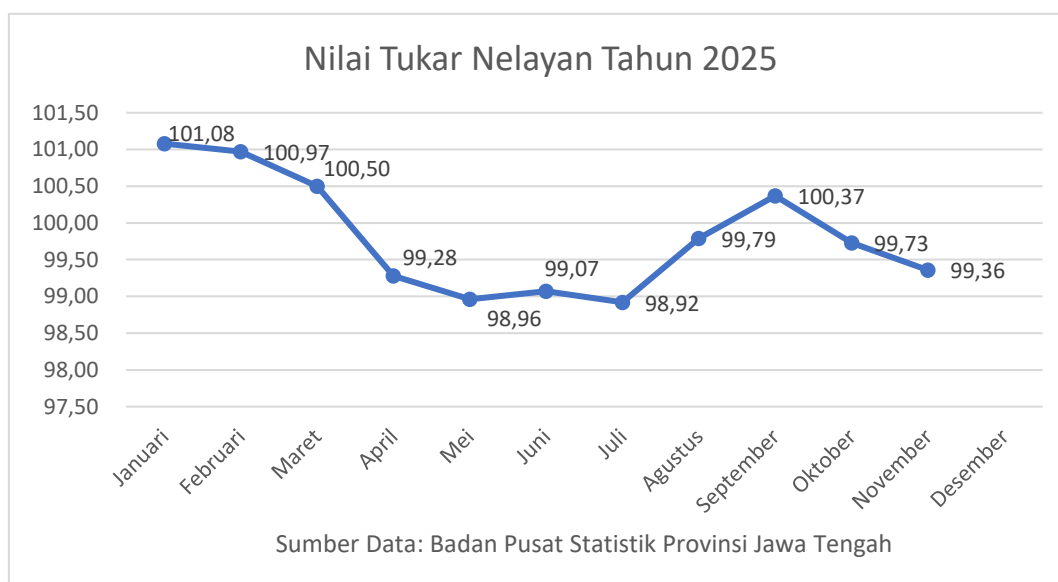
Rendahnya angka konsumsi ikan masyarakat di Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: perubahan tren konsumen, keberlanjutan usaha poklaksar dan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat membuat pelatihan kurang relevan dan kurang efektif. Tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif dan memantau pasar secara aktif, pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan, sosialisasi dan pendampingan pemenuhan persyaratan cara pengolahan ikan yang baik, sosialisasi dan kampanye Gemarikan serta kolaborasi dengan *stakeholder* terkait.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan

Indikator kinerja nilai tukar nelayan didukung oleh 1 (satu) program, yaitu: Program pengelolaan perikanan tangkap. Pengampu program pengelolaan perikanan tangkap meliputi Bidang Perikanan Tangkap serta 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan. Perhitungan nilai tukar nelayan tiap bulan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTN merupakan indikator kemampuan tukar (*term of trade*) komoditas produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Jika nilai NTN pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kemampuan tukar nelayan pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya.

NTN menunjukkan perbandingan antara indeks yang diterima (It) dengan indeks yang dibayar nelayan (Ib) yang dinyatakan dalam indeks atau persentase. Secara konsep, NTN menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di daerah perairan umum dan wilayah pedesaan pesisir terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap. Perkembangan NTN selama tahun 2025 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3.4. Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

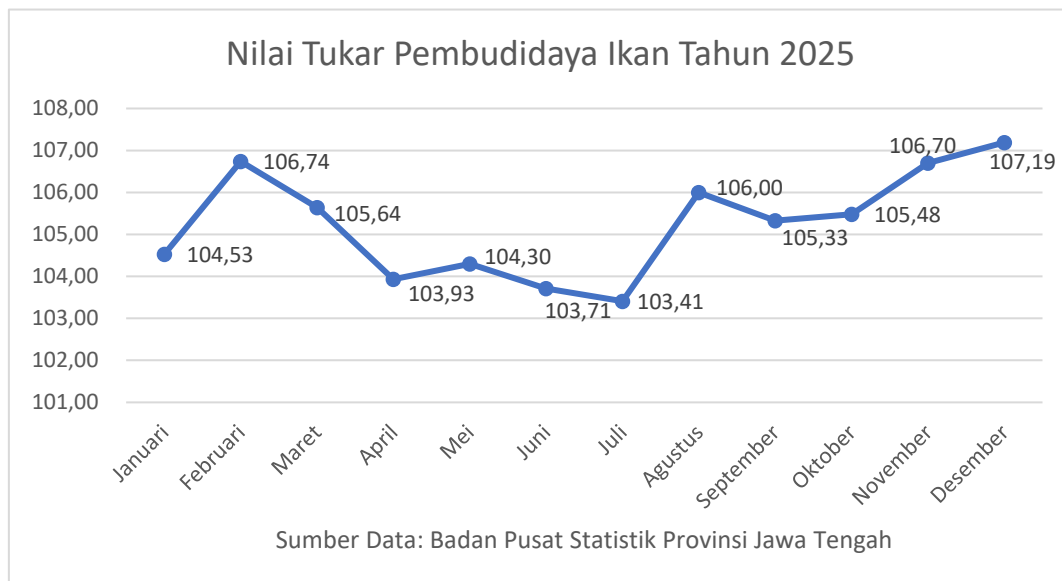
Pada tahun 2025, NTN mencapai nilai tertinggi 101,08 pada bulan Januari. Namun mengalami penurunan hingga nilai terendah sebesar 98,92 pada bulan Juli. NTN kembali mengalami peningkatan mencapai nilai 100,37 pada bulan September. Pada triwulan IV NTN mengalami penurunan secara berturut-turut hingga bulan Desember dengan nilai 99,36. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi NTN diantaranya: cuaca/musim yang tidak menentu sehingga nelayan berhenti melaut yang mengakibatkan penurunan drastis hasil tangkapan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual ikan di tingkat nelayan akan memperkecil nilai tukar, serta ketergantungan nelayan kepada pemilik modal membuat posisi tawar nelayan rendah sehingga harga beli ikan dari nelayan seringkali ditentukan oleh pemilik modal.

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

Indikator kinerja nilai tukar pembudidaya ikan didukung oleh 1 (satu) program, yaitu: Program pengelolaan perikanan budidaya. Pengampu program pengelolaan perikanan budidaya meliputi Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut serta Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Perhitungan nilai tukar pembudidaya ikan tiap bulan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (I_t) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (I_b). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan, nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

Perkembangan NTPi selama tahun 2025 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3.5. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2025 NTPi cukup fluktuatif dimana nilai tertinggi mencapai 107,19 pada bulan Desember. Nilai NTPi terendah tercatat sebesar 103,41 pada bulan Juli. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi NTN diantaranya: Cuaca dan serangan hama/penyakit ikan dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga memicu kerugian, serta komponen biaya seperti pakan ikan, benih, dan bahan bakar (BBM) sering kali mengalami kenaikan harga yang langsung menekan NTPi.

6. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif

Indikator sasaran terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif yaitu Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan

dan perikanan. Indikator Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan didukung oleh 1 (satu) program, yaitu: program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengampu program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Timur dan Selatan.



Gambar 3.18. Kegiatan Penyadartahuan Nelayan



Gambar 3.19. Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha



Gambar 3.20. Kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan



Gambar 3.21. Kegiatan *Coaching Clinic* bagi Pengawas Perikanan

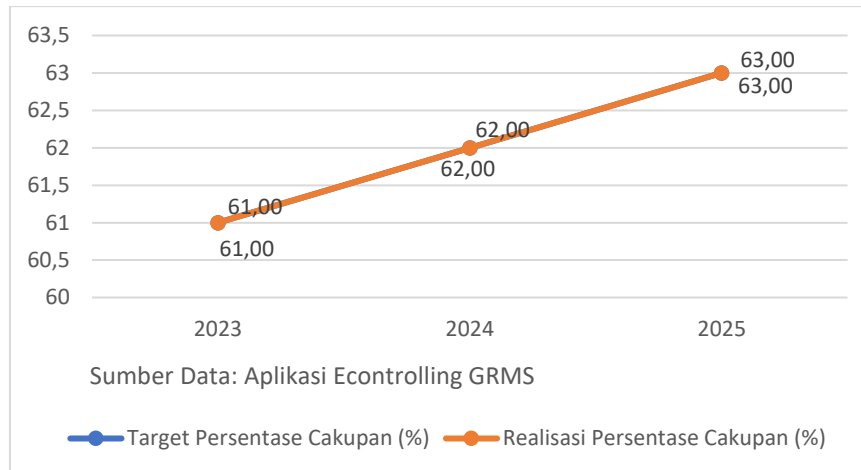


Gambar 3.22. Kegiatan Pembinaan Pokmaswas



Gambar 3.23. Kegiatan Pengawasan Budidaya di Perairan Umum Daratan

Realisasi persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan tersaji pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3.6. Target dan Realisasi Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2023-2025

Realisasi persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar 63% sehingga persentasenya sebesar 100% atau kategori sangat tinggi. WPPNR I yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) telah dilakukan di dua WPP yang ada di Jawa Tengah yaitu WPP 712 laut Jawa di wilayah pantura (pantai Utara dari Kab. Brebes sampai Kab. Rembang) dan WPP 573 Samudera Hindia di wilayah Pantai Selatan (pantai Selatan Kab. Wonogiri sampai Kab. Cilacap). Pengawasan selain dilakukan oleh aparat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan juga dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP sampai dengan 12 mil dan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah di Jawa Tengah adalah:

1. Masih belum optimalnya pengurusan perizinan berusaha pada sektor kelautan dan perikanan khususnya kategori Mikro dan Kecil, meskipun perizinan berusaha tersebut bisa terbit otomatis.
2. Belum optimalnya Pengawasan perizinan berusaha berbasis Resiko sektor Kelautan dan perikanan pasca diundangkannya Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dengan masih banyaknya penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan / yang dilarang seperti arad (mini trawl), bolga / purse seine waring, sodo (*push net*) dengan kapal dan alat penangkap ikan jenis garuk kerang yang masih banyak beroperasi di jalur la, sehingga potensi konflik antar nelayan masih banyak terjadi, potensi konflik semakin tinggi pasca diterbitkannya Permen KP nomor 36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.
4. Masih adanya penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pengawet produk perikanan terutama pada produk kering.
5. Belum adanya regulasi level daerah tentang Pengenaan Sanksi Administratif.

Pemecahan masalah dalam kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP di Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam percepatan, pertukaran data dan informasi tentang perizinaan berusaha berbasis resiko dan termasuk kegiatan Pengawasannya.
2. Optimalisasi kearifan lokal terhadap penggunaan alat ramah lingkungan dan Sosialisasi larangan penggunaan alat penangkapan ikan dan ketaatan pelaku usaha kelautan dan Perikanan terhadap perundangan yang berlaku dengan penegasan tentang sanksi pidana terhadap ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Optimalisasi sosialisasi dan pengawasan larangan penggunaan formalin mulai dari dalam proses penanganan ikan diatas kapal, unit pengolahan ikan hingga ke pasar – pasar tradisional yang menjual produk hasil perikanan serta melakukan kooordinasi antar provinsi karena disinyalir produk yang mengandung formalin bersal dari provinsi tetangga.
4. Optimalisasi patroli pengawasan di laut terhadap usaha penangkapan ikan dengan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Optimalisasi Pokmaswas dalam membantu kegiatan pengawasan pengelolaan SDKP berbasis masyarakat.
6. Membangun sinergi antar Pemerintah Pusat – Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
7. Segera menyusun regulasi di level provinsi terkait Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif.

7. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah yaitu indeks kepuasan masyarakat. Indikator indeks kepuasan masyarakat didukung oleh 1 (satu) program, yaitu: program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Pengampu program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi meliputi Sekretariat, Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat, Timur dan Selatan serta 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan.

Tabel 3.9.
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,75	84	89,25	106,25
Persentase Capaian Sasaran Strategis					109,34
Kategori					Sangat Tinggi

Sumber Data: Aplikasi Econtrolling GRMS

Dari tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 sebesar 106,25% atau kategori sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 106,76% dari target akhir tahun Renstra 2026. Target indikator indeks kepuasan masyarakat dapat tercapai karena terdapat 17 (tujuh belas) unit pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:

1. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat;
2. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur;
3. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan;

4. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut;
5. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
6. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
7. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
8. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung;
9. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending;
11. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor;
12. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;
13. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
14. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
15. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
16. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan; dan
17. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat melalui metode penyebaran kuesioner secara *daring* (aplikasi ESKM Jateng) maupun langsung kepada pengguna layanan di masing-masing unit pelayanan publik. Berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, unsur survei kepuasan masyarakat yang tertera pada kuesioner terdiri dari:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
9. Sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan semester 2 diperoleh bahwa pelayanan yang masuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu kelengkapan sarana dan prasarana, biaya dan produk spesifikasi jenis pelayanan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan, perilaku pelaksana dan prosedur.

8. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Indikator sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan risiko daerah yaitu indeks manajemen risiko. Indikator indeks manajemen risiko didukung oleh 1 (satu) program, yaitu: program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Dalam hal ini pengampu program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi adalah sekretariat khususnya sub bagian program.

Tabel 3.10.
Realisasi Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Manajemen Risiko	2,69	2,6	2,93	112,69
Persentase Capaian Sasaran Strategis					112,69
Kategori					Sangat Tinggi

Sumber Data: Aplikasi Econtrolling GRMS

Dari tabel 3.10 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 sebesar 2,93 dari target sebesar 2,6 sehingga persentase capaian sebesar 112,69% atau kategori sangat tinggi. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan

capaian kinerja tahun 2024 sebesar 2,69. Beberapa pernyataan risiko level tinggi dan sangat tinggi pada sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Pernyataan Risiko dan Upaya Pengendalian Pada Sasaran Strategis Tahun 2025

Indikator	Pernyataan Risiko	Level Risiko Melekat	Upaya Pengendalian	Level Risiko Residu
Produksi perikanan	Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	16	Pembuatan terumbu karang buatan, pengawasan penggunaan alat tangkap, monitoring hama penyakit ikan dan hibah/bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan	9
Produksi garam	Tingginya curah hujan dan proses produksi tradisional	16	Penggunaan teknologi dalam produksi garam dan bantuan/hibah kepada petambak garam	9
Angka Konsumsi Ikan	Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	12	Kampanye gemar makan ikan di masyarakat	6
Nilai Tukar Nelayan	Penurunan SDI dan cuaca buruk	12	Pembuatan terumbu karang buatan, pengawasan penggunaan alat tangkap dan hibah/bantuan kepada nelayan	9
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	12	Monitoring hama penyakit ikan dan bantuan/hibah kepada pembudidaya ikan	6
Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) yang dipantau dari kegiatan <i>Illegal, Unreported and Unregulated</i> (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Masih adanya IUU dan kegiatan masyarakat yang merusak SDKP	16	Sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan operasi pengawasan SDKP	6

Sumber Data: Aplikasi Econtrolling GRMS

Manajemen risiko merupakan alat strategis untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau Manajemen Risiko di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Pengelolaan Risiko yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 800/1484/I/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2025, didukung dengan total anggaran APBD sebesar Rp112.755.757.000,00 dan total anggaran APBN sebesar Rp2.000.000,00 dengan komposisi sebagai berikut :

Pagu Anggaran:

Belanja Operasi : Rp72.711.629.000,00
Belanja Modal : Rp40.044.128.000,00
Anggaran APBN : Rp2.000.000,00 (Tugas Pembantuan)

Realisasi Anggaran:

Belanja Operasi : Rp69.460.221.457,00 (95,53%)
Belanja Modal : Rp39.787.850.760,00 (99,36%)
Anggaran APBN : Rp1.970.000,00 (98,50%)

Rincian realisasi APBD dalam mendukung pencapaian sasaran tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	1.663.292.000	1.656.637.421	99,60
Program pengelolaan perikanan tangkap	42.883.560.000	42.568.216.721	99,26
Program pengelolaan perikanan budidaya	13.231.856.000	13.169.340.459	99,53
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1.360.226.000	1.357.800.048	99,82
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.593.133.000	1.490.899.706	93,58
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	52.023.690.000	49.005.177.862	94,20
TOTAL	112.755.757.000	109.248.072.217	96,89

Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp112.755.757.000,00 digunakan untuk membiayai 6 Program dan 22 Kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar 96,89% atau terealisasi sebesar Rp109.248.072.217,00 dengan realisasi fisik 100%.

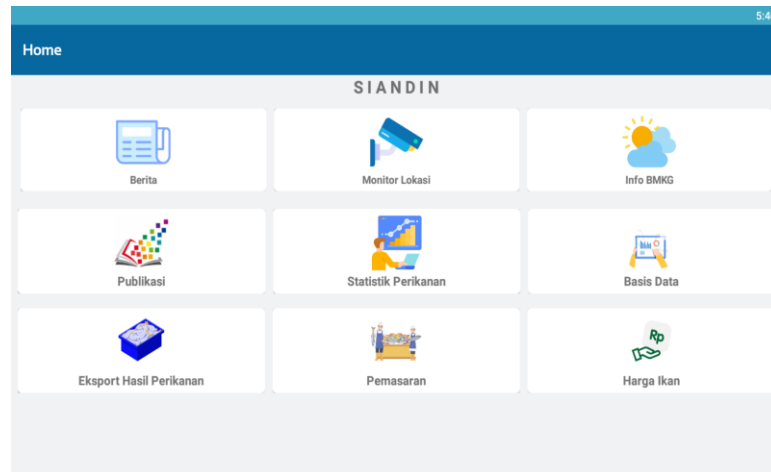
3.3 Inovasi

Inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 antara lain pengembangan Sistem Analisis Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan (SIANDIN), Sistem Analisis Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan-Hibah Daerah Terintegrasi (SIANDIN-HIDRASI), Asuransi Nelayan Jawa Tengah, Teknologi Pergaraman (Geoisolator/*Geomembrane*) dan Nila Salin.

1. Sistem Analisis Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan (SIANDIN)

Aplikasi SIANDIN kedepan akan banyak membantu nelayan dalam mengakses informasi. Mulai dari cuaca, berita, publikasi, ekspor hasil perikanan, statistik

perikanan, pemasaran, harga ikan, dan sebagainya. Aplikasi SIANDIN dibuat untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi melalui *gadget* atau *handphone* sehingga nelayan, pelaku usaha, pemilik kapal, dan masyarakat secara umum dapat mengakses dengan cepat.



3.24. Tampilan Aplikasi SIANDIN

2. Sistem Analisis Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan-Hibah Daerah Terintegrasi (SIANDIN-HIDRASI)

Aplikasi yang memudahkan pengusulan, verifikasi dan validasi hibah kelautan dan perikanan bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



3.25. Tampilan Aplikasi SIANDIN-HIDRASI

3. Asuransi Nelayan Jawa Tengah

Jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha

penangkapan ikan, berupa pemberian bantuan asuransi bagi nelayan Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun.



Gambar 3.26. Penyerahan Kartu Asuransi Nelayan Kepada 24 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

4. Teknologi Pergaraman (*Geoisolator/Geomembrane*)

Peningkatan Produksi Garam melalui pemanfaatan geoisolator untuk memproduksi garam rakyat. Beberapa manfaat penggunaan geoisolator, yaitu:

- a. Bahan baku pembuatan garam yang berupa air tidak mudah susut terserap ke lahan tambak garam.
- b. Warna hitam pada *geomembrane* mengakibatkan penyerapan sinar matahari lebih baik.
- c. Produktivitas meningkat minimal 20%, waktu kristalisasi lebih cepat sehingga mempercepat proses produksi dan efisien waktu.
- d. Produksi garam yang dihasilkan lebih putih dan bersih karena tidak bercampur dengan tanah.



Gambar 3.27. Produksi Garam Menggunakan Geoisolator/Geomembrane

5. Nila Salin

Budidaya Nila Salin adalah budidaya ikan nila di perairan payau (salinitas rendah). Keunggulan nila salin sebagai berikut :

- a. Memiliki daya tahan tubuh yang tinggi.
- b. Lebih kuat terhadap serangan penyakit.
- c. Toleran terhadap suhu rendah atau tinggi.
- d. Pertumbuhan cepat (sekitar 3 bulan panen).
- e. Efisiensi pakan.
- f. Cita rasa daging yang gurih.



Gambar 3.28. Program Unggulan Budidaya Nila Salin

3.4 Penghargaan

Pada tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai berikut:

A. Tingkat provinsi

- Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.29. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan dapat merealisasikannya. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari *stakeholder* secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan transparan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Produksi Perikanan” sebesar 102,30% atau kategori Sangat Tinggi;
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Produksi Garam” sebesar 131,68% atau kategori Sangat Tinggi;
3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)” sebesar 100% atau kategori Sangat Tinggi;
4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan” sebesar 94,72% atau kategori Sangat Tinggi;
5. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan” sebesar 97,00% atau kategori Sangat Tinggi;
6. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif” sebesar 100% atau kategori Sangat Tinggi;

7. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” sebesar 106,25% atau kategori Sangat Tinggi;
8. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah” sebesar 112,69% atau kategori Sangat Tinggi;
9. Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp3.507.684.783 atau 3,11%.

4.2. REKOMENDASI

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 telah memberikan gambaran yang jelas untuk terus meningkatkan kinerja pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2025 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi kebijakan pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelaku usaha perikanan dan kelautan dengan memberikan bantuan stimulan, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pembinaan/penyadartahuan sebagai upaya meningkatkan produktivitas pelaku usaha serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mempromosikan produk-produk hasil kelautan dan perikanan serta membangun jaringan pemasaran sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan di Jawa Tengah.
3. Meningkatkan kualitas SDM personil serta sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah menuju pelayanan prima.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Semarang, 23 Februari 2026

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Endi Faiz Effendi, S.Pi, M.A
Pembina Utama Muda (Ivc)
NIP. 197109091996031006

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607

Faksimile 024-3551289 Laman <http://dkp.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endi Faiz Effendi, SPI, MA

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Endi Faiz Effendi, SPI, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199603 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan			
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	1,1 (%)
Sasaran			
1.1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	952.718 (Ton)
1.2	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	134.640 (Ton)
Tujuan			
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	108,05 (Angka)
Sasaran			
2.1	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	17,3(Kg/Kapita/Tahun

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2.2	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	105,5 (Angka)
2.3	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	110,5 (Angka)
Tujuan			
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	0,79 (%)
Sasaran			
3.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	63 (%)
Tujuan			
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	83 (Angka)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Sasaran			
4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 (Angka)
4.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,6 (Angka)

Program	Anggaran	Keterangan
1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 52.023.690.000,-	APBD
2. PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Rp. 1.663.292.000,-	APBD
3. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 42.883.560.000,-	APBD
4. PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 13.231.856.000,-	APBD
5. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 1.360.226.000,-	APBD
6. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 1.593.133.000,-	APBD

Semarang,

2025

GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Endi Faiz Efendi, SPi, MA
Perbina Utama Muda
NIP. 19710909 199603 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	952.718 (Ton)
2	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi Garam	134.640 (Ton)
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	40,92 (kg/kapita/tahun)
4	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	105,50 (Angka)
5	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	110,50 (Angka)
6	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan Kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	63 (%)
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 (Angka)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	83 (Angka)

Semarang,

2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650117 199010 1 001